

**STRATEGI KOLABORASI PELAKSANAAN OPERASI ASIH ASUH DALAM  
MELINDUNGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL OLEH DINAS  
SOSIAL DAN SATPOL PP DI KOTA JAKARTA TIMUR**

Enjelin Rahajeng Adjani

NPP. 30.0498

Asdaf Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: enjelinrahajengadjani@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Drs. Florianus Aser, M.Si

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** The author focuses on the problem of the large number of people with social welfare problems in the East Jakarta Administrative City. **Purpose:** The purpose of this study is to explain the collaboration component implemented by the Social Service Office with the Civil Service Police Unit in empowering Persons with Social Welfare Problems in the East Jakarta Administrative City. **Method:** The research method used is descriptive qualitative research and with data collection techniques using interviews, observation, and documentation. **Result:** From the research conducted by the author, the results obtained are research showing that the components of collaboration include: Face-to-face dialog that is carried out such as meetings or meetings has not gone well because many are not present. Building trust in expressing opinions and helping each other and complying with all agreed rules. Commitment to the collaboration process where each agency involved is able to be responsible for its duties and obligations. Shared understanding, even though the vision and mission are not the same but have the same goal. The temporary impact has increased the empowerment of people with social welfare problems through the Asih Asuh operation. Supporting factors for the collaboration component are policies on handling people with social welfare problems, providing assistance and training and a strong commitment, while inhibiting factors for the collaboration component are the culture of people in the city who are less concerned about government operations. **Conclusion:** Based on the results of research that the author has carried out in Tuban district regarding Government Collaboration in Protecting Communities Against the Impact of Limestone Burning Activities in Tuban Regency, it can be concluded that the implementation of Operation Asih Asuh in improving the welfare of the people of the East Jakarta administrative city has gone well but is still around 75% because of the inhibiting factors found in the implementation of this operation. Therefore, socialization of people with social welfare problems is carried out, assistance is always carried out so that the community is economically prosperous, and the latest data collection is carried out so that people with social welfare problems can be protected and empowered, after this is done the result is that many people are successful and able to live as normal citizens who are no longer included in people with social welfare problems because they are economically prosperous enough.

**Keywords:** Collaboration, Asih Asuh Operation, Empowerment

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penulis berfokus pada permasalahan tentang banyaknya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Administrasi Jakarta Timur. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan komponen kolaborasi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Administrasi Jakarta Timur. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, hasil yang diperoleh adalah penelitian menunjukkan bahwa komponen kolaborasi diantaranya: Dialog tatap-muka yang dilakukan seperti pertemuan atau rapat belum berjalan dengan baik karena banyak yang tidak hadir. Membangun kepercayaan dalam menyampaikan pendapat serta saling membantu dan mematuhi segala aturan yang telah disepakati. Komitmen pada proses kolaborasi dimana setiap instansi yang terlibat mampu bertanggung jawab pada tugas dan kewajibannya. Pemahaman bersama, walaupun visi dan misi tidak sama tetapi memiliki tujuan yang sama. Dampak sementara telah mengalami peningkatan terhadap pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui operasi Asih Asuh. Faktor pendukung komponen kolaborasi yaitu adanya kebijakan tentang penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, pemberian bantuan dan pelatihan dan adanya komitmen yang kuat, sedangkan faktor penghambat komponen kolaborasi yaitu budaya masyarakat di kota yang kurang peduli terhadap operasi pemerintah. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan di kabupaten Tuban mengenai Kolaborasi Pemerintahan Dalam Melindungi Masyarakat Terhadap Dampak Aktivitas Pembakaran Batu Kapur Di Kabupaten Tuban dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan Operasi Asih Asuh dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat kota administrasi Jakarta Timur sudah berjalan baik namun masih sekitar 75% karena ditemukannya faktor penghambat pelaksanaan operasi ini. Oleh karena itu dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial, selalu dilakukannya pendampingan agar masyarakat sejahtera perekonomiannya, dan melakukan pendataan terbaru sehingga masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial dapat dilindungi dan diberdayakan, setelah hal itu dilakukan hasilnya banyak masyarakat yang berhasil dan mampu hidup sebagai warga normal yang tidak lagi masuk ke dalam penyandang masalah kesejahteraan sosial karena sudah cukup sejahtera perekonomiannya. **Kata kunci:** Kolaborasi, Operasi Asih Asuh, Pemberdayaan.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh semua negara. Pembangunan merupakan upaya sadar dan terencana untuk mengubah perilaku masyarakat. Pembangunan nasional adalah upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam suatu negara dan merupakan proses mengembangkan suatu sistem yang utuh untuk mencapai tujuan nasional. Sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945, pembangunan harus dilakukan secara adil dan merata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pembangunan juga merupakan proses membangun suatu wilayah dari pinggiran dengan memperkuat daerah dalam satu kerangka nasional, dan meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat.

Antara proses pembangunan terdapat berbagai permasalahan dalam lingkup masyarakat, salah satu permasalahan yang timbul di masyarakat yaitu permasalahan sosial. Permasalahan sosial merupakan suatu hal atau fenomena yang memiliki banyak dimensi. Permasalahan sosial melanda kota-kota besar

di dunia termasuk kota-kota di provinsi DKI Jakarta. Segala bentuk perubahan terjadi cukup cepat sehingga memacu meningkatnya permasalahan sosial dengan berbagai pola di dalamnya.

Provinsi DKI Jakarta itu sendiri memiliki beberapa kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 wilayah provinsi DKI Jakarta terdiri dari lima Kota Administrasi dan satu Kabupaten Administrasi. DKI Jakarta memiliki luas sekitar 664,01 km<sup>2</sup> (lautan: 6.977,5 km) dengan jumlah penduduk di wilayah DKI Jakarta yaitu 275,77 juta jiwa hingga pertengahan 2022. (databoks.katadataco.id, 07/09/2022). DKI Jakarta merupakan wilayah pusat pemerintahan, bisnis, dan pendidikan. Namun sayangnya di DKI Jakarta itu sendiri memiliki angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tinggi. Proses pembangunan ekonomi maupun industri di wilayah provinsi DKI Jakarta tumbuh cukup cepat. Namun hal tersebut juga menyebabkan munculnya arus globalisasi dan memberi pengaruh dalam kehidupan. Meluasnya krisis perekonomian, sosial dan politik, serta pemerintahan menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Segala dinamika yang terjadi dengan cepat menimbulkan meningkatnya permasalahan sosial dengan bermacam pola di dalamnya. Proses pembangunan ekonomi maupun industri di wilayah provinsi DKI Jakarta tumbuh cukup cepat. Namun hal tersebut juga menyebabkan munculnya arus globalisasi dan memberi pengaruh dalam kehidupan. Meluasnya krisis perekonomian, sosial dan politik, serta pemerintahan menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Segala dinamika yang terjadi dengan cepat menimbulkan meningkatnya permasalahan sosial dengan bermacam pola di dalamnya.

Setiap warga masyarakat memiliki hak mendapatkan suatu kehidupan yang berada di lingkungan yang baik. Seperti yang disebut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 9 Tentang Hak Asasi Manusia yaitu “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.” Hal tersebut harus dijunjung tinggi, dihormati, dan juga dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah serta setiap orang yang hidup di dalamnya. Penyandang masalah kesejahteraan sosial di DKI Jakarta cukup tinggi. Salah satu penyebab penurunan kesejahteraan masyarakat di Indonesia menurut *Institute for Development of Economics and Finance* yaitu gagalnya operasi maupun pembuatan kebijakan oleh pemerintah, Dengan ini Dinas Sosial DKI Jakarta sebagai pemberi fasilitas dan Satpol PP sebagai aparat yang membantu dalam rekrutmen masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial diharapkan mampu merealisasikan harapan maupun tuntutan masyarakat. Dalam melaksanakan operasi dan misinya Dinas Sosial dan Satpol PP diharapkan lebih mampu membuat penyelenggaraan pelayanan maupun bantuan sosial, membina peranan masyarakat dalam membangun kesejahteraan sosial di DKI Jakarta, serta memberi fasilitas untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Dengan itu, tentunya diperlukan strategi ataupun operasi yang terpadu serta tepat dalam menangani permasalahan ini yaitu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Salah satu operasi yang diterapkan yaitu operasi “Asih Asuh” yang dijalankan dan direalisasikan dengan baik dan profesional oleh Dinas Sosial dan Satpol PP. Dalam permasalahan ini, Dinas Sosial dan Satpol PP berkolaborasi dan bekerjasama dalam menjalankan operasi ini bertujuan untuk memberi wadah dan pelayanan kepada warga PMKS dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat. Pemberdayaan juga dilakukan untuk mensejahterakan hidupnya.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Permasalahan yang berkaitan dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial di DKI Jakarta cukup tinggi. Kesejahteraan yang merupakan cita-cita dan harapan dari bangsa Indonesia. Kemerdekaan bukan saja tentang kebebasan dari penjajah, lebih dari itu kemerdekaan adalah bagaimana tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Terbebas dari belenggu kemiskinan. Masalah kemiskinan masih saja menjadi sorotan utama bagi negara kita terkait dengan usaha-usaha Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) merupakan suatu permasalahan kesejahteraan sosial cukup besar yang terjadi di Indonesia terutama di wilayah provinsi DKI Jakarta. PMKS itu sendiri adalah seseorang atau sekelompok masyarakat yang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara memadai dan wajar baik itu kebutuhan jasmani, rohani, maupun sosial. Mereka tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya karena adanya suatu kesulitan atau hambatan.

Upaya dalam menanggulangi masalah kesejahteraan yang terjadi di masyarakat dilakukan dengan berbagai cara, seperti bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari, bantuan tenaga Kesehatan secara gratis, pendidikan, penyediaan lapangan kerja, dan sebagainya. Serangkaian upaya dan strategi tersebut, semuanya berorientasi material, sehingga nantinya akan tergantung pada ketersediaan anggaran dan komitmen pemerintah. Upaya penanggulangan untuk kesejahteraan masyarakat kini semakin mendesak kembali untuk dikaji ulang. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, meliputi jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan rehabilitasi sosial.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam bidang implementasi kolaborasi pemerintahan maupun bidang implementasi pemberdayaan PMKS. Penelitian oleh Septiani, dkk (2021) yang berjudul Faktor Pendukung dan Penghambat Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Luwu Utara. Menemukan hasil bahwa Upaya untuk memperbaiki efektivitas operasi berupa, dengan menentukan secara matang pelaksanaan operasi rehabilitasi mulai dari waktu pelaksanaan operasi rehabilitasi yang lebih sesuai dengan kriteria PMKS, pemberian operasi rehabilitasi yang tepat guna sehingga tercapainya tujuan dari dilaksanakannya operasi rehabilitasi yakni untuk membuat para PMKS tidak kembali lagi ke jalan serta aturan hukum Peraturan Daerah No 2 Kota Serang. Penelitian oleh R. Nuriana (2017) yang berjudul Pemberdayaan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) Lansia Terlantar di UPTD Griya Werdha Kota Surabaya. Menemukan hasil bahwa Upaya untuk membantu lansia di UPTD Griya Werdha agar dapat mendayagunakan kemampuan untuk melakukan sesuatu atau bertindak dan mengusahakan agar mampu mendatangkan hasil yang dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Penelitian oleh Nitha Citra Sari, (2012) yang berjudul Kinerja Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Cilegon menemukan hasil bahwa Masih belum efektifnya kinerja dinas sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis karena belum adanya panti rehabilitasi sehingga pemberian operasi rehabilitasi dapat lebih efektif. Penelitian oleh Ari Hardiawan (2015) yang berjudul Efektivitas Operasi Pembinaan Dinas Sosial Pada Wanita Pekerja Seks Di Kota Cilegon. Menemukan hasil bahwa Masih kurangnya waktu pelaksanaan operasi rehabilitasi, anggaran yang belum cukup untuk pembangunan panti rehabilitasi dan masih belum tepatnya cara sosialisasi kepada wanita pekerja seks. Penelitian oleh Asrul Nurdin (2013) yang berjudul Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di kota Makassar. Menemukan hasil bahwa Upaya dinas sosial kota makasar telah melakukan upaya sedemikian rupa, namun seiring perkembangan zaman yang semakin modern hal ini sangat riskan bagi kaum marjinal karena tidak sepenuhnya tau soal hal tersebut. Penelitian oleh Charles Irving Christian Pasaribu (2021) yang berjudul Kolaborasi Satuan Polisi Pamong Praja Dengan Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Kotawaringin Timur.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melaksanakan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, karena konteks penelitian sebelumnya berpatok pada efektivitas serta implementasi pemberdayaan PMKS. Memiliki metode yang sama dengan penelitian Nitha Citra Sari tetapi menggunakan teori yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori Analisis SWOT menurut Rangkuti (2016). Selain teori, rumusan masalah yang diangkat juga memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penulis menghubungkan penelitian dengan teori dari pemerintahan dan perlindungan masyarakat yang merupakan sesuai dengan tema fakultas.

#### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis strategi kolaborasi antara Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam pelaksanaan operasi asih asuh guna melindungi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan menganalisis pendukung pelaksanaan operasi Asih Asuh berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal berdasarkan Analisis SWOT

### **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci, untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sumber data, memberi nilai pada kualitas data, analisis terhadap data, menafsirkan data yang ada serta membuat kesimpulan atas temuan dalam penelitian (Sugiyono, 2017). Metode kualitatif deskriptif digunakan penulis karena langsung terjun ke lapangan sehingga di rasa lebih tepat. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai kolaborasi dalam pelaksanaan operasi asih asuh dalam melindungi PMKS di Jakarta Timur. Diharapkan juga melalui pendekatan ini dapat menjelaskan serta mengungkapkan kondisi aktual tentang kendala yang dihadapi dalam operasi asih asuh di Kota Jakarta Timur.

Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini ada 5 orang yang diambil dari Dinas Sosil Kota Jakarta Timur dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jakarta Timur.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis menggunakan teori Analisis SWOT menurut Rangkuti (2016) dijelaskan bahwa analisis situasi yang merupakan analisis yang ampuh dalam menentukan suatu strategi untuk menghadapi tantangan dan hambatan serta permasalahan yang dihadapi oleh organisasi, perusahaan dan pemerintahan. Teori ini didukung dengan empat variable yang menjadi pusat perhatian yaitu Strengths/Kekuatan, Weaknesses/Kelemahan, Opportunities/Peluang, Threats/Ancaman. Penulis menghubungkan teori tersebut dengan peraturan-peraturan yang memiliki hubungan terhadap permasalahan yang diteliti. Penyajian subbab juga disusun berdasarkan rumusan masalah yang ada pada penelitian.

#### **3.1. Kekuatan / *Strengths***

Dengan anggaran yang cukup, pihak penyelenggara operasi Asih Asuh (Dinas Sosial dan Satpol PP) dapat memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Anggaran yang cukup memungkinkan untuk mempekerjakan dan mempertahankan staf yang berkualitas tinggi dan profesional. Anggaran dimanfaatkan secara maksimal untuk operasi Asih Asuh yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial. Sarana dan prasarana yang memadai dapat membantu

operasi Asih Asuh dalam memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih efektif kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial. Sarana dan prasarana yang memadai dapat membantu operasi untuk mengembangkan fasilitas yang ramah dan nyaman bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial.

### **3.2. Kelemahan / *Weaknesses***

Sumber daya manusia yang berkualitas dan berpengalaman dapat membantu memberikan layanan yang lebih baik dan lebih efektif kepada masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial Dengan sumber daya manusia yang berkualitas. kurangnya jumlah sumber daya manusia yang tersedia dapat menghambat kemampuan operasi dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Kurangnya pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi sumber daya manusia juga dapat mengurangi efektivitas operasi. Selain itu kurangnya diversitas dalam sumber daya manusia dapat memengaruhi kemampuan operasi untuk mengakomodasi kebutuhan beragam masyarakat.

### **3.3. Peluang / *Opportunity***

Adanya potensi untuk meningkatkan partisipasi dan dukungan masyarakat melalui sosialisasi yang efektif tentang tujuan dan manfaat operasi Asih Asuh ini, memanfaatkan media sosial atau teknologi, serta meningkatkan komunikasi antara Dinas Sosial maupun Satpol PP dengan masyarakat. Namun perlunya memastikan kebenaran informasi yang disampaikan kepada masyarakat untuk mendapatkan partisipasi dan dukungan yang optimal.

### **3.4. Ancaman / *Treath***

Terdapat kemungkinan adanya perbedaan pandangan atau perspektif masyarakat terhadap operasi ini, yang dapat mengurangi partisipasi dan dukungan masyarakat. Potensi konflik atau perbedaan pendapat antar masyarakat dapat menghambat efektivitas operasi dan mempengaruhi citra operasi.

### **3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pemprov DKI Jakarta akan mengerahkan Satpol PP DKI Jakarta dan Dinas Sosial untuk menertibkan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Dalam mengatasi permasalahan ini tidak hanya Dinas Sosial namun juga Satpol PP yang saling bekerja sama untuk memberi perlindungan, pelayanan, maupun pemberdayaan karena operasi Asih Asuh juga berkaitan dengan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (tramtibumlinmas). Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini juga diperlukan peran dari masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, badan usaha, organisasi profesi, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. penyandang masalah kesejahteraan sosial di DKI Jakarta cukup tinggi. Salah satu penyebab penurunan kesejahteraan masyarakat di Indonesia menurut *Institute for Development of Economics and Finance* yaitu gagalnya operasi maupun pembuatan kebijakan oleh pemerintah, Dengan ini Dinas Sosial DKI Jakarta sebagai pemberi fasilitas dan Satpol PP sebagai aparat yang membantu dalam rekrutmen masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial diharapkan mampu merealisasikan harapan maupun tuntutan masyarakat. Dalam melaksanakan operasi dan misinya Dinas Sosial dan Satpol PP diharapkan lebih mampu membuat penyelenggaraan pelayanan maupun bantuan sosial, membina peranan masyarakat dalam membangun kesejahteraan sosial di DKI Jakarta, serta memberi fasilitas untuk menciptakan kesejahteraan sosial.

### 3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat dalam pemberdayaan PMKS yaitu masih banyak oknum pegawai Dinas Sosial maupun Satpol PP yang tidak menjalankan tupoksinya dengan baik dalam menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial sehingga menyebabkan ketidakpuasan masyarakat dalam hasil operasi Asih Asuh di Jakarta Timur

## IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan di kabupaten Tuban mengenai Kolaborasi Pemerintahan Dalam Melindungi Masyarakat Terhadap Dampak Aktivitas Pembakaran Batu Kapur Di Kabupaten Tuban dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan Operasi Asih Asuh dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat kota administrasi Jakarta Timur sudah berjalan baik namun masih sekitar 75% karena ditemukannya faktor penghambat pelaksanaan operasi ini. Oleh karena itu dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial, selalu dilakukannya pendampingan agar masyarakat sejahtera perekonomiannya, dan melakukan pendataan terbaru sehingga masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial dapat dilindungi dan diberdayakan, setelah hal itu dilakukan hasilnya banyak masyarakat yang berhasil dan mampu hidup sebagai warga normal yang tidak lagi masuk ke dalam penyandang masalah kesejahteraan sosial karena sudah cukup sejahtera perekonomiannya.

**Keterbatasan Penelitian.** Dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan utama yaitu pada kurang keterbukaannya PMKS terhadap informasi yang diperlukan oleh penulis. Selain itu penulis juga memiliki keterbatasan waktu dalam penelitian sehingga data dan informasi yang diperoleh masih kurang dan belum memenuhi keseluruhan dari aspek penelitian yang dilakukan.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis mengharapkan untuk penelitian kedepannya yang mengambil permasalahan yang sama dan tempat yang sama agar melakukan penelitian secara mendalam dan menyeluruh di semua aspek yang terkait di Kota Jakarta Timur, karena penulis menyadari dari hasil temuan penelitian ini yang masih tergolong awal.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing serta Dosen Penelaah yang telah mengambil andil untuk memberikan saran dan masukan dalam pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih kepada seluruh informan penelitian yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penulis selama pelaksanaan wawancara, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan pelaksanaan penelitian. Terima kasih.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Rangkuti, Freddy. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis : Analisis SWOT Cara Perhitungan Bobot, Rating, dan OCAI. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Nuriana, R. (2017). Pemberdayaan “PMKS”(Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) Lansia Terlantar di UPTD Griya Werdha Kota Surabaya (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Citra Sari, N. (2012). Kinerja Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Cilegon.

Septiani, E., & Muhammadiyah, M. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KABUPATEN LUWU UTARA.

Hardiawan, A. (2015). Efektivitas Program Pembinaan Dinas Sosial pada Wanita Pekerja Seks di Kota Cilegon (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).

Nurdin, A., Ali, F., & Yunus, R. (2011). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah No 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar. GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 71-78.

Pasaribu, C. I. C. (2022). KOLABORASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DENGAN DINAS SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).

